



RENCANA GARIS BESAR PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

1. Umum.

- a. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
- b. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
- c. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di atas, Pengadilan Militer II-09 Bandung akan menyelenggarakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka disusunlah Rencana Garis Besar Pencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI).

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Untuk memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Militer II-09 Bandung TA. 2019.
- b. **Tujuan.** Sebagai Pedoman bagi penyelenggara dalam Melaksanakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Militer II-09 Bandung TA. 2019.

3. Dasar.

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
- f. Surat Edaran Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/Djmt/SE/1/2019 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi TA. 2019 Dan Pencananangan Zona Integritas.

4. Rencana Penyelenggaraan.

- a. Organisasi
 - 1) Penanggung Jawab : Kadilmil II-09 Bandung
 - 2) Penasehat : Waka Dilmil II-09 Bandung
 - 3) Ketua Penyelenggara : Mayor Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
 - 4) Wakil Penyelenggara : Kapten Chk Supriyadi, S.H., M.H.
 - 5) Sekretaris : Lettu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H.
 - 6) Ajudan : Serka Dian Irmawan, S.H., M.H.
 - 7) Perwira Acara : Kapten Chk Saptari, S.H.

- 8) Cad. Perwira Acara : Lettu Chk (K) Sari Rahayu, S.H.
- 9) Pembawa Acara : Serma (K) Arnovy Widiastuti
- 10) Cad. Pembawa Acara : PNS. Wina Noviani Fatima., S.T.
- 11) Pembaca Do'a : Serma Yayat Sudrajat, S.H.
- 12) Cad. Pembawa Do'a : PNS. Suparjan.
- 13) Seksi Penerima Tamu : Mayor Chk Surya Saputra, S.H. M.H.
Lettu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H
Lettu Chk (K) Sari Rahayu, S.H
Serma Yayat Sudrajat, S.H.
- 14) Seksi Perlengkapan : PNS Mudhofar Ma'ruf
Serka Tri Wahyu Prasentiono
Seluruh Honorer
- 15) Seksi Pengamanan : Serka Sugiharjo
Serka Dian Irmawan, S.H., M.H.
Seluruh Security
- 16) Seksi Konsumsi : Mayor Chk (K) Sunti Sundari, S.H.
Kapten Sus Betty Noviani, S.H.
PNS. Muzaenab
PNS. Dewi Kurniawati
PNS. Cahyati Ratnasari
- 17) Seksi Perencanaan : PNS Priyadi
PNS Wina Noviani Fatimah, S.T.
Honorer Fajar Cipta Wandrian
- 18) Seksi Transportasi : Serka Wawan Setiawan
Serka Zulfahmy, S.H.
Koptu Rudi Setia Bhakti
Honorer Panji
- 19) Seksi Dokumentasi : Honorer Yudha Adi Andreanto
Honorer Deden
Honorer Jamhur

- b. Rencana Pelaksanaan
- 1) Hari, Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019.
 - 2) Waktu : Pukul 10.00 s.d. Selesai.
 - 3) Tempat : Aula lantai II Dilmil II-09 Bandung.
- c. Rencana Kebutuhan biaya : Rp4.220.000,00 (Empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (rincian terlampir).

5. Penutup

Demikian Rencana Garis Besar Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Militer II-09 Bandung TA. 2019.

Bandung, 19 Juni 2019

Ketua Penyelenggara,

Cap/Ttd

Dedi Wigandi. S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Lampiran :

1. Lampiran A (Kebutuhan Anggaran).
2. Lampiran B (Susunan Acara).
3. Lampiran C (Daftar Undangan).
4. Lampiran D (Denah).
5. Lampiran E (Konsep Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas).
6. Lampiran F (Konsep Banner Pencanaan Pembangunan Zona Integritas)